

LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA
NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA
SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR
BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang : 2006 - 2007
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut.
PT. Telkom Indonesia
Rapat ke : 14
Hari/Tanggal : Senin, 2 Juli 2007
Pukul : 09.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Acara : 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh Dirut PT. Telkom Indonesia
3. Tanya jawab
4. Penutup
Hadir : 42 orang Anggota dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Dirut. PT. Telkom Indonesia, Rinaldi Firmansyah, beserta
jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut. PT. Telkom Indonesia pada hari Senin tanggal 2 Juli 2007 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga, dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Mengingat telekomunikasi dan teknologi informasi merupakan industri strategis, Komisi I DPR RI minta Pemerintah dan PT. Telkom untuk memperkuat PT. Telkom, antara lain dengan memanfaatkan laba bersih PT. Telkom untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan teknologi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan aset PT. Telkom, sehingga PT. Telkom memiliki kemampuan modal dan daya saing yang tinggi, serta mampu berkompetisi dengan operator lain, terutama operator milik asing.
2. Sehubungan dengan kenyataan masih lemahnya industri telekomunikasi Indonesia, sedangkan kebutuhan sebagian terbesar CAPEX (belanja modal) masih diimpor, Komisi I DPR RI minta PT. Telkom untuk secara strategis membangun dan memperkuat industri telekomunikasi, termasuk membangkitkan kembali PT. Inti yang pada saat sekarang mati suri.

3. Dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, Komisi I DPR RI mendesak PT. Telkom untuk memperkecil kesenjangan digital (*digital divide*) di Indonesia dengan segera memberi layanan yang lebih efisien dan murah dengan cara mengoptimalkan teknologi serta mengembangkan layanan, terutama di Indonesia bagian Timur. Komisi I DPR RI juga minta PT. Telkom mengevaluasi kebijakan tarifnya, baik untuk telepon maupun internet agar menjadi lebih rendah, sehingga penetrasinya di masyarakat dapat lebih cepat.
4. Komisi I DPR RI minta PT. Telkom untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan layanan umum seperti telepon umum, saluran-saluran darurat dan informasi, dengan menambah dan menjaga kualitas telepon umum, khususnya di daerah terpencil dan yang belum terjangkau telepon, serta memperbaiki kualitas saluran darurat dan informasi dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Dalam hubungan ini, mengingat besarnya animo masyarakat terhadap kemajuan telekomunikasi dan informatika, Komisi I DP RI minta PT. Telkom untuk mendukung pengembangan wartel dan warnet yang merupakan simpul distribusi telekomunikasi dan informatika di masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang baik, harga yang kompetitif, dan dukungan pemberdayaan, serta pengembangan TV lokal dan lembaga penyiaran komunitas.
5. Sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan E-Parlemen sebagaimana yang diprogramkan oleh Depkominfo, Komisi I DPR RI minta PT. Telkom untuk mendukung program tersebut, sehingga dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi, DPR RI dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya.
6. Untuk memajukan industri ICT (*Information and Communication Technology*) nasional, Komisi I DPR RI minta PT. Telkom untuk memaksimalkan penggunaan dan pengembangan produk dalam negeri dan bekerjasama dengan berbagai perusahaan nasional dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan teknologi informasi.
7. Untuk peningkatan kinerja PT. Telkom serta kualitas mekanisme pengawasan internal fungsi pengawasannya, Komisi I DPR RI menyarankan agar PT. Telkom membentuk fungsi dan mekanisme ombudsman Telkom untuk menampung penyampaian informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan serta masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian secara tuntas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA
A-525